

PENGARUH FAKTOR FINANCIAL DAN NON-FINANCIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

Adolf Z.D. Siahay
Siti Rofingatun
Faramitha Indah Kendek

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditures, Opinions on Regional Government Financial Reports, and Regional Head Competence on Regional Government Financial Performance in Regencies/Cities in Papua Province. Hypothesis testing was tested empirically using Multiple Regression. The results of this study indicate that simultaneously, the variables Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditures, Opinions on Regional Government Financial Reports and Regional Head Competence affect the financial performance of regional governments.

Keywords : *financial; non-financial, financial performance.*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca reformasi terutama dari sisi kewenangan dan akuntabilitas. Pergeseran tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 berimplikasi pada pemerintah pusat memberikan hak, wewenang dan kewajiban yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah secara mandiri. Pemberian kewenangan ini dikenal dengan otonomi daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana umum ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas dan mempermudah kegiatan masyarakat utamanya terkait ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan PAD pemerintah daerah. Tingginya PAD berimplikasi pada meningkatnya alokasi belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Akhirnya membentuk suatu siklus yang saling berkaitan antara belanja dan alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan daerah.

Tabel 1 menyajikan data rasio antara Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah dimana persentase selama periode 2017-2020 berturut-turut sebesar 25,29%, 25,78%, 23,93% dan 17,02%. Alokasi Belanja Modal masih relatif sangat kecil dan Realisasi Belanja Modal mengalami *trend* menurun dibanding Total Belanja Daerah terutama pada tahun 2020 dikarenakan terdampak pandemi COVID-19.

Bila dihubungkan dengan siklus Belanja Modal dan PAD, dengan nilai Belanja Modal yang kecil maka sarana dan prasarana yang akan dibangun menjadi lebih sedikit dan berdampak pada produktivitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat dan pemerintah. Rendahnya alokasi Belanja Modal terhadap Total Belanja dipengaruhi oleh alokasi Belanja Operasional dan Belanja Tidak Terduga.

Tabel 1 Rasio antara Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah Kab/Kota/Prov se-Papua periode Tahun 2017-2020 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Belanja Daerah	37.983,66	39.291,18	41.125,46	37.600,50
Belanja Modal	9.605,18	10.129,62	9.839,85	6.401,15
Persentase	25,29%	25,78%	23,93%	17,02%

Sumber: diolah dari LHP BPK atas LKPD se-Provinsi Papua

Tabel 2 menyajikan data realisasi penyerapan anggaran Belanja Modal dimana persentase selama periode 2017-2020 berturut-turut sebesar 76,87%, 84,27%, 79,68% dan 75,39%. Realisasi Belanja Modal mengalami *trend* fluktuatif dengan nilai minimal 75,39% pada tahun 2020 dikarenakan terdampak pandemi COVID-19. Tidak maksimalnya penyerapan Belanja Modal secara rata-rata di seluruh wilayah papua dapat menjadi masalah dalam proses pemerataan percepatan dan pembangunan.

Tabel 2 Rasio antara Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kab/Kota/Prov se-Papua periode Tahun 2017-2020 (dalam miliar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2017	12.399	9.605	77,47%
2018	11.898	10.130	85,13%
2019	12.179	9.840	80,79%
2020	8.344	6.401	76,72%

Sumber: diolah dari LHP BPK atas LKPD se-Provinsi Papua

Asnidar dan Hardi (2019) dalam penelitiannya menunjukkan terdapat Pengaruh signifikan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa,

dengan bertambahnya infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian Haryanto dan Lathifa (2019) menemukan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa aspek finansial berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah, namun selain aspek keuangan terdapat aspek non finansial yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah diantaranya Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2017 menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional oleh BPK sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dari pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tersebut akan dilihat apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau belum. Semakin banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka akan mempengaruhi opini yang akan diberikan. Ketidaksesuaian yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria dan ditentukan tingkat materialitasnya.

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 bahwa BPK akan mengeluarkan sebuah Opini Audit sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan dan Efektivitas Sistem pengendalian Intern yang memadai.

Tabel 3 menyajikan data ringkasan klasifikasi Opini BPK atas LHP LKPD Kab/Kota/Prov se-Papua dimana selama periode 2017-2020 mengalami *trend* peningkatan

pemerolehan opini WTP oleh pemerintah daerah dan semakin berkurangnya pemerintah daerah yang memperoleh Opini WDP dan TMP, dimana pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 19 pemda yang memperoleh Opini WTP, delapan pemda memperoleh Opini WDP dan tiga masih memperoleh Opini TMP.

**Tabel 1.6 Ringkasan Klasifikasi Opini BPK atas LHP LKPD
Kab/Kota/Prov se-Papua periode Tahun 2017-2020**

No	Klasifikasi Opini	2017	2018	2019	2020
1	WTP	9	11	18	19
2	WDP	11	11	8	8
3	TW	0	0	0	0
4	TMP	10	8	4	3
	Jumlah	30	30	30	30

Sumber: IHPS BPK Semester II Tahun 2021

Berdasarkan hasil uraian beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah masih terdapat *research gap* atau perbedaan hasil penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor kinerja keuangan daerah yang terdiri dari faktor finansial dan faktor non finansial. Faktor finansial merupakan aspek keuangan yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sedangkan, faktor non finansial terdiri dari Opini Audit dan Kompetensi Kepala Daerah yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat melihat kemampuan keuangan setiap daerah secara mandiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya, sehingga berbagai pembiayaan guna meningkatkan pelayanan dimasyarakat yang berasal dari PAD dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian yang diangkat yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
5. Apakah Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit dan Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.

5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Kompetensi Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
6. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit dan Kompetensi Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah dapat digunakan berbagai macam indikator kinerja. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho dan Rohman (2012) dalam Asnidar dan Hardi (2019:12).

Rasio kemandirian memberikan gambaran seberapa besar tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi). Rasio kemandirian juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Penelitian ini menggunakan indikator rasio kemandirian keuangan APBD pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah. Menghitung rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Asnidar dan Hardi 2019:13). Bertambahnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat sehingga dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut yang mana hal ini berarti juga akan berdampak pada peningkatan belanja modal (Purwanto, 2013 dalam Arpani dan Halmawati, 2020:2377).

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain.

Fungsi Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan Belanja sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran atau 1 periode akuntansi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial akan diperoleh di masa depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan seluruh sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun kriteria Belanja Modal menjadi Aset tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan;
2. Seluruh biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Barang operasional normal entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan perusahaan atau instansi pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam perumusan opini, pemeriksa mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Kompetensi Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 menyatakan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang terdiri dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditentukan dan ditetapkan. Sedangkan Standar kompetensi kerja merupakan rumusan kemampuan kerja yang terdiri dari tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan atau keahlian serta sikap kerja

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria dan kinerja dalam jabatan tertentu. Penilaian Kompetensi adalah merupakan suatu proses perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh calon atau pemegang jabatan dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut.

Priyono dan Marnis (2008) menyatakan bahwa yang menjadi acuan dalam menyusun dan mengembangkan kompetensi yaitu melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan guna meningkatkan kinerja lembaga. Lebih lanjut, Priyono (2010) menyatakan bahwa spesifikasi pekerjaan disusun berdasarkan pekerjaan dengan mengacu kepada karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas seseorang agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan kompetensi kepala daerah. Salah satunya dapat diperoleh dari latar belakang/ jenjang Pendidikan formal dari kepala daerah tersebut. Menurut Wiersema dan Bantel (1992) dalam Widagdo (2017:311) mengatakan bahwa melalui pendidikan seseorang mampu mengembangkan potensinya, sehingga dapat mewujudkan kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, perusahaan dan negara (Magoutas *et al.*, 2011 dalam Widagdo, 2017). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin kompleks pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang dimilikinya. Dalam penelitian Sebaa *et al.* (2009) dalam Widagdo (2017) menyatakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan mengarah ke peningkatan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini menggunakan indikator kompetensi kepala daerah yang merupakan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki kepala daerah yang diukur dengan jenjang pendidikan formal.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, yang berperan untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas sehingga menjadi dasar pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut uraian hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor pembanding untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah yang diproksikan dengan tingkat kemadirian suatu keuangan daerah, sehingga semakin tinggi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah suatu daerah. Hasil penelitian Haryanto dan Lathifa (2019) serta Keizia (2021) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ketergantungan pendanaan pemerintah daerah dari pemerintah pusat diketahui dari besarnya Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah. Dana Perimbangan yang disajikan dari APBD terdiri dari DAU, DAK, DBH. Semakin besar Dana Perimbangan, maka semakin besar intervensi pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan pemerintah daerah. Keizia (2021) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah

aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satuan kerja Kementerian/Lembaga. Sehingga Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang di percaya akan memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu maka aset tetap yang dimiliki bisa saja akan memberikan peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

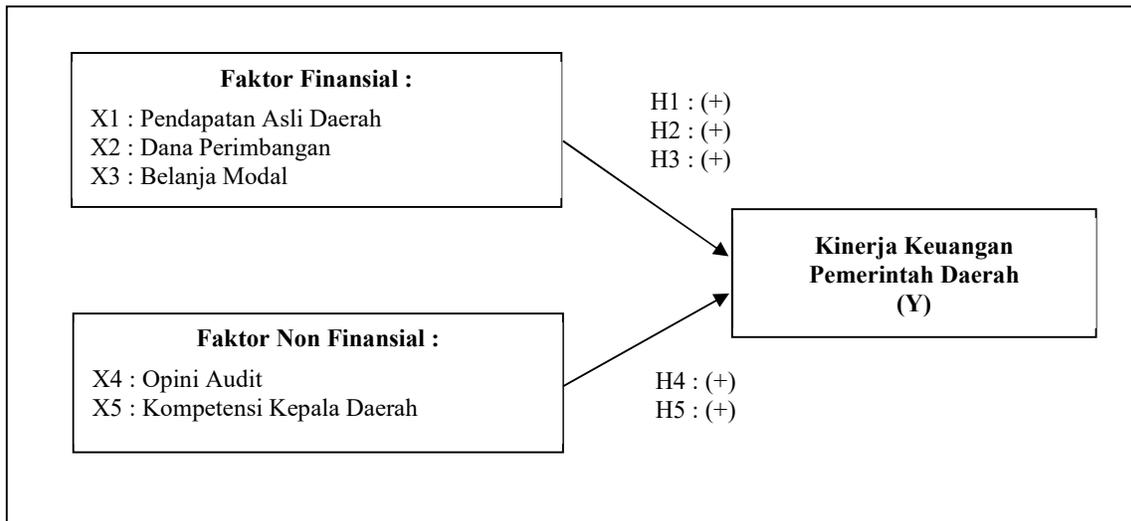
Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu pemerintah daerah maka sangat penting untuk menilai laporan keuangan pemerintah tersebut, laporan keuangan suatu pemerintah daerah merupakan asersi atau pernyataan pihak manajemen yang masih perlu dinilai kebenarannya, sehingga perlu untuk dilakukan audit untuk memberikan suatu keyakinan kepada pengguna bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, disajikan secara cukup dalam pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan dan sistem pengendalian yang memadai, dengan demikian maka opini audit yang merupakan pernyataan professional menjadi ukuran kualitas atas penyajian laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi merupakan gambaran kualitas yang dimiliki seseorang dalam menjalankan suatu jabatan yang di embannya. Sehingga kompetensi kepala daerah adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seorang kepala daerah dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan suatu daerah. Seorang kepala daerah dapat berperan dan berfungsi apabila memiliki kompetensi yang berkualitas.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, dimana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, opini audit dan kompetensi kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan rasio kemandirian, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Model Penelitian



Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H4 : Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H5 : Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H6 : PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit dan Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah faktor finansial, faktor non finansial dan kinerja keuangan, dengan unit analisis seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota/Provinsi yang berada di Provinsi Papua tahun 2017-2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen laporan keuangan *audited*. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua tahun 2017-2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Tahun 2017-2020 pemerintah daerah yang menjadi target sampel.

Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2019:126) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Papua dari tahun 2017-2020 yang berjumlah 120, terdiri dari 28 pemerintah kabupaten, satu pemerintah kota dan satu pemerintah provinsi dalam rentang waktu empat tahun (terdiri dari 30 pemerintah kabupaten/kota/provinsi dikali dengan empat tahun).

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh dimana sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Provinsi Papua dengan rentang waktu tahun 2017-2020, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 120 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti melalui perantara berupa data yang sudah diolah. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah yang telah diaudit (LHP LKPD) yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Papua. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi dimana peneliti mencatat dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut Sugiyono (2019:118) metode verifikatif yaitu “metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”. Penelitian ini menggunakan metode analisis verifikatif, yang bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel atau menguji hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan, dengan bantuan alat analisis regresi yang dilakukan untuk melihat pengaruh faktor finansial, dan faktor non finansial terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan *explanatory research*, karena tujuan dari penelitian *explanatory* adalah ingin mengetahui dan menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Kemudian, pengamatan menggunakan cakupan waktu (*time horizon*) yang bersifat *cross section* dan *time series*, artinya informasi atau data yang diperoleh antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua dan dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Provinsi periode 2017-2020.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (sebagai Variabel Dependen)

Dalam penelitian ini Indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio kemandirian keuangan APBD pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua. Dirjen perimbangan Keuangan Negara (2015) dalam Sitorus (2016) menyatakan bahwa analisis rasio digunakan untuk melihat hubungan antar akun yang terdapat didalam suatu laporan keuangan, untuk melakukan analisis kinerja

keuangan pemerintah daerah salah satunya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan APBD, yaitu:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 19). Dana Perimbangan yang disajikan dari APBD terdiri dari DAU, DAK, DBH. Semakin besar Dana Perimbangan, maka semakin besar intervensi pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan pemerintah daerah.

Belanja Modal

Menurut Haryanto, Arifuddin, dan Sahmuddin (2007) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Adalah Total Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap.

Opini Audit

Dalam penelitian ini menggunakan Opini audit menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Opini Audit yang dilakukan oleh BPK Badan Pemeriksa Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Bastian (2007) Terdapat 5 (lima) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, variabel opini audit terdiri dari: (1) pernyataan menolak memberikan opini (TMP), (2) opini tidak wajar (TW), (3) opini wajar dengan pengecualian (WDP), (4) opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau opini wajar tanpa pengecualian dengan Paragraf penjelas (WTP DPP), dan (5) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Variabel opini audit menggunakan skor dari 1 yang terendah sampai skor 5 yang tertinggi.

Kompetensi Kepala Daerah

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kompetensi menggunakan kompetensi yang digunakan bahwa latar belakang tingkat pendidikan formal. Variabel kompetensi kepala daerah, yaitu: latar belakang Pendidikan Formal akan diberikan angka 1.SMU, 2. I/DII/DIII (Diploma). 3. DIV/S1. 4. S2 (Magister). 5. S3 atau (Doktor)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Simultan Faktor Finansial dan Faktor Nonfinansial terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diketahui dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Kepala Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua. Adapun besarnya pengaruh secara simultan adalah 98,6%, dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 99,3% menunjukkan hubungan variabel penelitian sangat kuat/sangat erat.

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis satu selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua. Hasil uji parsial (*t-test*) memberikan informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara parsial adalah 118,77% ($1,245 \times 0,954 \times 100\%$, *standardized coefficient beta* dikali *correlations Zero Order* dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 95,4% menunjukkan hubungan variabel penelitian sangat kuat.

Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis dua selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan menggunakan variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua. Hasil uji parsial (*t-test*) memberikan informasi bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara parsial adalah negatif 20,05% ($-0,410 \times 0,489 \times 100\%$, *standardized coefficient beta* dikali *correlations Zero Order* dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 48,9% menunjukkan hubungan variabel penelitian sedang.

Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis tiga selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil

pengujian dengan menggunakan variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua. Hasil uji parsial (*t-test*) memberikan informasi bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara parsial adalah 0,48% ($0,015 \times 0,321 \times 100\%$, *standardized coefficient beta* dikali *correlations Zero Order* dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 32,1% menunjukkan hubungan variabel penelitian rendah.

Analisis Pengaruh Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis empat selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan menggunakan variabel Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Papua. Hasil uji parsial (*t-test*) memberikan informasi bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara parsial adalah -0,72% ($-0,014 \times 0,516 \times 100\%$, *standardized coefficient beta* dikali *correlations Zero Order* dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 51,6% menunjukkan hubungan variabel penelitian sedang.

Analisis Pengaruh Kompetensi Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis lima selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan menggunakan variabel Kompetensi Kepala Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di

Provinsi Papua. Hasil uji parsial (*t-test*) memberikan informasi bahwa Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara parsial adalah 0,19% ($0,007 \times 0,273 \times 100\%$, *standardized coefficient beta* dikali *correlations Zero Order* dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 27,3% menunjukkan hubungan variabel penelitian rendah.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Mahardini, N.Y. (2014) yang menyatakan bahwa Kompetensi Kepala Daerah yang diukur dengan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Mahardini, N.Y. (2014) melakukan pengujian terhadap 147 pemerintah daerah selama periode 2011-2012 dimana hasilnya menunjukkan level Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pendidikan dan masa jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Interaksi antar karakteristik kepala daerah yang menyatakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah interaksi antara variabel tingkat Pendidikan dengan masa jabatan.

SIMPULAN

Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Kompetensi Kepala Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Kepala Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti ukuran pemerintah daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, belanja daerah, transfer pemerintah pusat-dana otonomi dan masa kerja kepala daerah.
2. Menggunakan pengukuran kinerja keuangan dan model estimasi lain seperti menggunakan rasio keuangan lainnya seperti rasio efisiensi dan rasio efektivitas dan rasio Desentralisasi Fiskal.
3. Penelitian selanjutnya disarankan agar memperluas objek penelitian lain pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang dimiliki.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua agar memaksimalkan penggunaan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua agar memaksimalkan alokasi belanja modal dalam rangka meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P.,H dan Tama, I, G, M, A, A. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Prespektif Akuntansi/Volume 1/Nomor 1 (Oktober 2018)*, hal. 91-113 ISSN: 2623-0194(Print), 2623-0186(Online) <http://ejournal.uksw.edu/persi>.
- Aji dan Mukhibad. (2020). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas 3 (1): 97-115. ISSN (Print) 2442-2363*.
- Asnidar dan Hardi, Z. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika/Volume 3 Nomor 1/Tahun 2019 Fakultas Ekonomi Universita Samudra*.
- Arpani,N,W dan Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2, No 1, Seri D, Februari 2020, Hal 2373-2390*.
- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I 2015. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester II 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Ditasari dan Sudrajat (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi / Volume 4 /Nomor 2/ Tahun 2020*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuanga, Kementerian Keuangan. (2015). *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Driana, R.M, Sulandri, S dan Rihandoyo, S (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang. *Journal of Public Policy And Management Review/Volume 3,Nomor 3 Tahun 2014*.
- Elmiza dan Arza. F. I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi. 2(2), Seri C, 2807-2825*.
- Febrina, R. dan Aisyah (2021). Pengaruh Penguasaan Kompetensi Teknis Terhadap Kinerja Pegawai yang dimoderasi oleh kompetensi SMART ASN Pada Jabatan Pelaksana Penyusun Bahan Publikasi dan Kehumasan. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia JENIUS / Volume 5 /Nomor 1/ September Tahun 2021.p-ISSN: 2581-2769 e-ISSN: 2598-9502*

- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryanto. Arifuddin dan Sahmuddin, (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryanto, dan Lathifa. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 8/ Nomor 2/tahun 2019. ISSN 2337-3806 (Online). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Handayani, K.,D., (2019). Pengaruh Opini dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017). *Skripsi Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung*.
- Hendawati, Komarasakti dan Ansori. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. ISSN 2541-061X(Online). ISSN2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>. <http://repository.stei.ac.id/2768/4/BAB%20III%20METODA%20PENELITIAN.pdf>. Diakses pada 19 agustus 2022 pukul 14.00 WIT.
- Ilmiyyah, Dewata dan Sarikadarwati. (2017). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. E-ISSN: 2548-9836 Vol. 5 No. 1, July 2017, 147-162
- Keizia, S., (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Thesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Kurnia, D.,. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue Volume 01.No.1 Juni 2020*. p-ISSN 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501.
- Mahardini, N.Y. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Lokasi Pemerintahan, Jumlah Populasi, dan Besar APBD sebagai Variabel Kontrol. *Thesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14. hal. 1150-1182.
- Nuaeni, Ita, (2020). Pengaruh Pengalaman Bisnis dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI. *Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu/perpustakaan.upi.edu*.
- Rante, Irwanto. Analisis terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten penguin bintang. *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*.

- Sitorus, F. J. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara). *Thesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Suandani, K.P. dan Astana, G.P.B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 12 No : 03 Tahun 2021 e- ISSN: 2614 – 1930*.
- Sukmayanti, N. P., Bagia, I.W., dan Suwendra, I.W.,. (2016). Pengaruh Kompetensi Intelektual dan Pengembangan Karir Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)*.
- Syahputra, Tirtha., dkk. (2019). Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Opini Audit dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (Volume 27 Nomor 2, 2019)*.
- Tahir, Irmayunita., dkk. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Tata Kelola* hal 61-70. ISSN 2089-0982 DOI: 10.17605/OSF.IO/VC8TK
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006. *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006. *Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. *Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05 Tahun 2013. *Tentang Bagan Akun Standar*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 . *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara.*

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.*

Priyono dan Marnis., (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Surabaya: Zifatama. ISBN : 978-602-6930-18-7.

Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Surabaya: Zifatama. ISBN: 978-602-6930-16-3.

Pusdiklatwas, BPKP. (2014). *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Bogor: Pusdiklatwas BPKP.

Verayanti, P.D, Nuridja, M. dan Indrayani L. (2014). Pengaruh Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Udiksha P-ISSN :2599-1418 E-ISSN :2599-1426 Volume 4, Nomor 1, 2014.*

Wirda, F, dan Azra, T. (2015). Kompetensi Manajerial dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Industri Kreatif Sumatera Barat. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ISBN: 978-602-17129-5-5.*

Widagdo, K.A. dan Munir Moh. (2017). Profil kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. *ISSN 1979-6471 Volume 20 No.2, Oktober 2017.*

<https://www.Gurupendidikan.Co.Id/Opini-Audit/>, Pada Tanggal 18 Oktober 2022 Pkl. 02.30 Wit